



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKjIP.

Dengan selesainya penyusunan LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Terakhir kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan LKjIP ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Tanjung Pati      Februari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**dr. Hj. TIEN SEPTINO, M. Kes**  
**NIP. 19630910 199101 2 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN WEWENANG	1
C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	5
D. ISU-ISU STRATEGIS	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	1
	0
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	1
	2
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPPKBPPPA	1
	2
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	1
	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
	8
A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA	1
	8
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	1
	9
C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA	2
	0
D. ANALISIS EFISIENSI	4

	4
E. REALISASI ANGGARAN	4
	4
BAB IV : PENUTUP	5
	5
Lampiran	
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Prestasi yang diperoleh Tahun 2021	

### DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	: Capacity Building bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	25
Gambar III. 2	: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati dan Kepala Perangkat Daerah / Pokja PUG dan Stakeholders se- Kabupaten Lima Puluh Kota	25
Gambar III. 3	: Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dimasa <i>Pandemi Covid-19</i> di Kecamatan Suliki	26
Gambar III. 4	: Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dimasa <i>Pandemi Covid-19</i> di Kecamatan Suliki	26
Gambar III. 5	: Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dimasa <i>Pandemi Covid-19</i> di Kecamatan Guguak	27
Gambar III. 6	: Seminar Pengembangan Potensi Diri dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	27
Gambar III. 7	: Seminar Pengembangan Potensi Diri dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	28
Gambar III. 8	: Seminar Mengenali dan Mengatasi Kecanduan Anak Pada Internet, Game Online dan Pornografi	28
Gambar III. 9	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	34
Gambar III. 10	: Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	34
Gambar III. 11	: Penyerahan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya kepada Kabupaten Lima Puluh Kota	35
Gambar III. 12	: Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Suliki	41
Gambar III. 13	: Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Suliki	41
Gambar III. 14	: Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Lareh Sago Halaban	42

Gambar III. 15 : Penyuluhan dan dialog interaktif tentang MKJP di Radio 42

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP2KBP3A Tahun 2021	6
Tabel 2	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP2KBP3A Tahun 2021	6
Tabel 3	:	Jumlah Sarana dan Prasarana di DP2KBP3A Tahun 2021	7
Tabel 4	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021	16
Tabel 5	:	Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2021	44

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	:	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan ARG tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	21
Grafik 2	:	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	22
Grafik 3	:	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	23
Grafik 4	:	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	29
Grafik 5	:	Rasio KDRT Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	31
Grafik 6	:	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	32
Grafik 7	:	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	36
Grafik 8	:	Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	37
Grafik 9	:	Persentase Keluarga Prasejahtera Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	38
Grafik 10	:	Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	40
Grafik 11	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	43

## Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 11.279.023.119,- (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan 9 program, dan 21 kegiatan serta 48 sub kegiatan.

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.815.327.462,- (Sembilan milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 86,88% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2021 realisasi keuangan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 92,63% dan realisasi fisik dapat dicapai 100%. Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja, dibandingkan tahun 2020 (284,53%) maka rata-rata realisasi kinerja tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 79,52% dengan predikat tinggi.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2021. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

**B. TUGAS DAN WEWENANG**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DP2KBP3A menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pengendalian

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

4. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah sub bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum, kualitas keluarga serta data dan informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

**C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

C.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di DP2KBP3A Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	1	2	3
2	D3	0	7	7
3	D4	0	3	3
4	S1	4	10	14
5	S2	1	2	3
	Total	6	24	30

Adapun Susunan Kepegawaian pada DP2KBP3A terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 orang Kepala Seksi dan 3 Kepala Sub Bagian dan fungsional umum sebanyak 9 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di DP2KBP3A Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	7
2	Golongan III	6	16	22
3	Golongan IV	2	3	5
	Jumlah	10	22	32

## C.2. Sarana dan Prasarana

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Beberapa jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.  
Jumlah Sarana dan Prasarana  
di DP2KBP3A Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	267,2 m <sup>2</sup>
2	Bangunan tempat ibadah	42 m <sup>2</sup>
3	Bangunan BP KB Kec. Kapur IX	50 m <sup>2</sup>
4	Bangunan BP KB Kec. Guguak	50 m <sup>2</sup>
5	Bangunan BP KB Kec. Payakumbuh	50 m <sup>2</sup>
6	Bangunan BP KB Kec. Suliki	50 m <sup>2</sup>
7	Bangunan BP KB Kec. Gunuang Omeh	50 m <sup>2</sup>
8	Bangunan BP KB Kec. Bukik Barisan	50 m <sup>2</sup>
9	Bangunan BP KB Kec. Pangkalan Koto Baru	50 m <sup>2</sup>
10	Bangunan BP KB Kec. Situjuah Limo Nagari	50 m <sup>2</sup>
11	Bangunan BP KB Kec. Lareh Sago Halaban	50 m <sup>2</sup>
12	Bangunan BP KB Kec. Luak	50 m <sup>2</sup>
13	Bangunan BP KB Kec. Harau	50 m <sup>2</sup>
14	Bangunan BP KB Kec. Akabiluru	50 m <sup>2</sup>
15	Bangunan BP KB Kec. Mungka	50 m <sup>2</sup>
16	Kendaraan roda empat	10 unit
17	Kendaraan roda dua	79 unit
18	Komputer	20 unit
19	Laptop	35 unit
20	Printer	29 unit

**D. ISU-ISU STRATEGIS**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

3.1.2 Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum seluruh nagari memiliki data mikro
2. Masih tingginya jumlah keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera dan KS1
3. Masih rendahnya upaya pemberdayaan kelompok UPPKS dan Tribina
4. Tingginya jumlah unmetneed
5. Tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
7. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon berada di Pemerintah Pusat
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Tingginya CPR tidak diikuti dengan penurunan persentase TFR

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

3.1.3 Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki
2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
11. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
13. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi
2. Masih tingginya jumlah keluarga kategori PS dan KS1 dan belum seluruhnya masuk kedalam basis pendataan keluarga
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok UPPKS dan tribina dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
4. Belum optimalnya tingkat pelayanan dan penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat
5. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
6. Tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)
7. Belum optimalnya peran kelembagaan di daerah dalam implementasi PPRG
8. Masih rendahnya kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga
9. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif
11. Belum optimalnya kelembagaan PUG
12. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilah
13. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
14. Belum optimalnya peran kelembagaan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
15. Belum optimalnya kelembagaan di daerah dalam mengimplementasikan Kabupaten Lima Puluh Kota Layak Anak.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, isu-isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021.

**BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi tentang metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, analisis efisiensi anggaran dan realisasi anggaran.

**BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan dimasa yang akan datang.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) DPPKBPPA**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

DP2KBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Permasalahan Terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2KBP3A
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2KBP3A
4. Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Permasalahan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Keluarga Berencana

1. Belum seluruh nagari memiliki data mikro
2. Masih tingginya jumlah keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera dan KS1
3. Masih rendahnya upaya pemberdayaan kelompok UPPKS dan Tribina
4. Tingginya jumlah unmetneed
5. Tingginya jumlah perkawinan perempuan di usia bawah 20 tahun
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
7. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon berada di Pemerintah Pusat
8. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
9. Tingginya CPR tidak diikuti dengan penurunan persentase TFR

Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Masih rendahnya OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai kepala keluarga perempuan dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki
3. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
4. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
5. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

9. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
10. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
11. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
12. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
13. Belum optimalnya OPD dalam mengimplementasikan perencanaan yang mendukung pencapaian KLA
14. Masih rendahnya OPD yang memiliki data terpilah

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa ”**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong;
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan dalam 11 agenda prioritas pembangunan, yaitu :

1. Revolusi mental

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselarasi pembangunan sumber daya manusia
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 DPPKBPPPA diharapkan berperan dalam mewujudkan misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”.

Terkait RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sangat mendukung pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pada Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kesetaraan gender, Keluarga Berencana dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Sasaran dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan dengan meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan, dan menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan di atas yaitu pertama melalui penguatan pada kebijakan dan regulasi terhadap peran gender, perlindungan anak dan perempuan, dengan kebijakan yang ditempuh dalam mendukung strategi di atas berfokus pada meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender. Kedua melalui penurunan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

kebijakan yang ditempuh fokus pada menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga strategi dengan memenuhi seluruh indikator dalam penilaian KLA, dengan kebijakan difokuskan pada pemenuhan indikator KLA.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut pada tahun 2021 DPPKBPPPA melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan dimana Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pihak Pertama dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan	1.1 Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan ARG	100%
		1.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	14,3 %
		1.3 Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	70 %
2.	Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.1 Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	>900
		2.2 Rasio KDRT	0,019%
		2.3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%
3.	Terwujudnya keluarga	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,27%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

	berencana dan keluarga sejahtera	3.2 Total Fertility Rate (TFR)	2,37%
		3.3 Persentase Keluarga Prasejahtera	3,3%
		3.4 Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100%
4.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA	4.1 Nilai akuntabilitas kinerja OPD	71

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa didalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan dengan indikator kinerja : Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan ARG, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi.
2. Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja : Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak, Rasio KDRT, dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.
3. Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Total Fertility Rate (TFR), Persentase keluarga prasejahtera dan Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk.
4. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA dengan indikator kinerja : Nilai akuntabilitas kinerja OPD

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /  
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % - 90%	Tinggi
3.	66 % - 75%	Sedang
4.	51 % - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, setelah membandingkan target kinerja dan reasilasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 ini berhasil sangat baik dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bisa diberi predikat **tinggi** karena rata-rata realisasi kinerja dari 11 indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah sebesar 79,52 %.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 540/30/KEP/DPPKBPPPA-LK/IX/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, IKU DPPKBPPPA adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	%	8,6	8,6	8,6	14,3	14,3	14,3
Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,39	1,39	136	1,33	1,30	1,27
	Total Tertility Rate (TFR)	%	2,53	2,53	2,49	2,45	2,41	2,37

**B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		Realisasi	% Capaian	Predikat
		Satuan	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

1	Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan ARG	%	100	100	100	Sangat tinggi
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	%	14,3	5,71	39,93	Sangat rendah
		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	70	70	100	Sangat tinggi
2	Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Skor	>900	800	88,89	Tinggi
		Rasio KDRT	%	0,019	0,035	54,29	Rendah
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Sangat tinggi
3	Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,27	1,27	100	Sangat tinggi
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2,37	2,48	95,56	Sangat tinggi
		Persentase Keluarga Prasejahtera	%	3,3	4,71	70,06	Sedang
		Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	100	29,11	29,11	Sangat Rendah
4	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	71	68,78	96,87	Sangat tinggi

**C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**

1. Sasaran strategis 1. Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

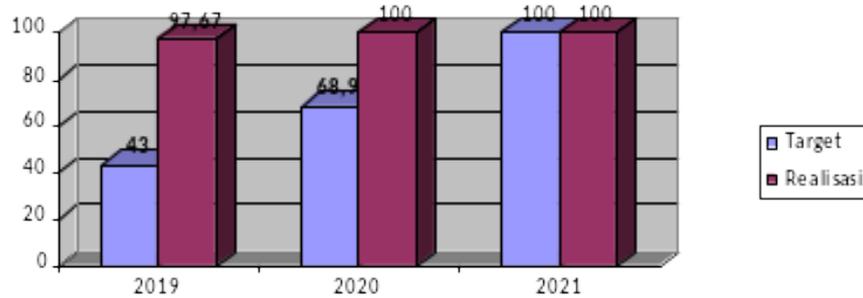
No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan ARG		6,8	33,3	13,8	90,48	43	97,67	68,9	100	100	100	
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota		8,6	8,62	8,6	11,42	14,3	5,7	14,3	5,7	14,3	5,7	
3.	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi		20	20	40	40	50	50	60	60	70	70	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan ARG (Anggaran Responsif Gender), target tahun 2021 adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau tercapai sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh OPD telah membuat atau melampirkan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) pada RKA/DPA OPD. Dari 43 jumlah OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 43 OPD telah melampirkan GAP/GBS pada RKA/DPA OPD yang bersangkutan, sehingga target dari indikator dapat terpenuhi.

Grafik 1  
Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan ARG tahun 2019 sampai dengan 2021

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

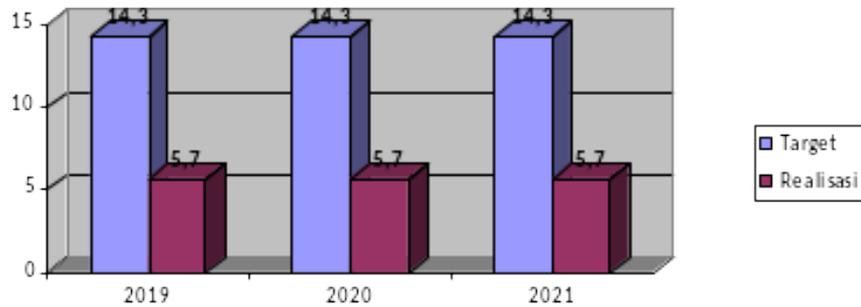


Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks manfaat ARG tidak terfokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, melainkan bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil dan merata. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan pagu dana sebesar Rp. 12.472.900,-, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp 17.290.000,- dan Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp. 18.358.000.

Indikator Kinerja 2 : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, target tahun 2021 adalah 14,3% dan realisasi adalah 5,7% atau tercapai sebesar 38,86%. Realisasi untuk tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik 2  
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sampai dengan  
tahun 2021

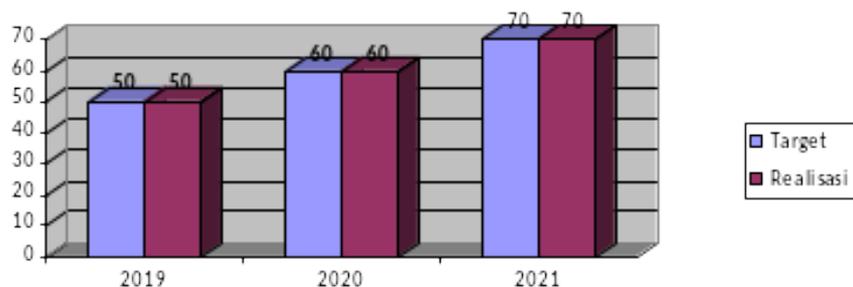
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Dari hasil pemilihan legislatif tahun 2019, dari 35 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang dengan jenis kelamin perempuan. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu dana Rp 17.290.000,-.

Indikator Kinerja 3 : Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, target tahun 2021 adalah 70% dan realisasi adalah 70% atau tercapai sebesar 100%.

Grafik 3  
Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021



Realisasi indikator kinerja ini dapat tercapai disebabkan dengan telah diberdayakannya perempuan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan dalam

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

rangka meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga. Perempuan dalam kelompok perempuan kepala keluarga diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga didalam rumah tangga antara lain : karena perceraian, suami meninggal, serta perempuan hamil yang mempunyai anak setelah ditinggal oleh laki-laki. Karena besarnya peran perempuan selain mencari nafkah juga memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya sehingga memaksa perempuan memainkan perannya sebagai penyangga ekonomi keluarga. Untuk itulah program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi perempuan dalam kelompok perempuan kepala keluarga untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi serta memberikan peluang kepada perempuan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian diharapkan kaum perempuan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat lokal, terutama berkontribusi dalam pendapatan keluarga yang pada gilirannya perempuan dapat meningkatkan posisi tawar menuju keadilan dan kesetaraan gender. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 27.684.600,-.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat di bawah ini.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Gambar III.1  
Capacity Building bagi Kaukus Perempuan Politik  
Indonesia (KPPi)



Gambar III.2  
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan  
Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati dan Kepala  
Perangkat Daerah / Pokja PUG dan Stakeholders se- Kabupaten  
Lima Puluh Kota

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Gambar III.3

Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dimasa *Pandemi Covid-19* di Kecamatan Suliki



Gambar III.4

Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dimasa *Pandemi Covid-19* di Kecamatan Suliki

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Gambar III.5  
Pelatihan Kewirausahaan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi  
Perempuan dimasa *Pandemi Covid-19* di Kecamatan Guguk



Gambar III.6  
Seminar Pengembangan Potensi Diri dan Peningkatan Kualitas  
Hidup Perempuan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Gambar III.7  
Seminar Pengembangan Potensi Diri dan Peningkatan Kualitas  
Hidup Perempuan



Gambar III.8  
Seminar Mengenal dan Mengatasi Kecanduan Anak Pada  
Internet, Game Online dan Pornografi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



**1. Sasaran Strategis 2 : Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1.	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak		601 (skor)	714	601 (skor)	650	701	893	801	893	>900	800	
2.	Rasio KDRT			0,94	0,027	0,024	0,024	0,008	0,022	0,001	0,019	0,035	
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

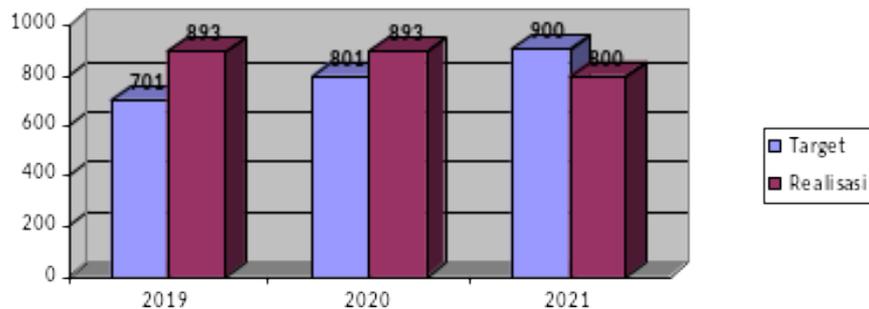
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak, target tahun 2021 adalah dengan skor lebih dari 900 realisasi dengan skor 800 atau tercapai sebesar 88,89 %.

Grafik 4

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 sampai dengan 2021



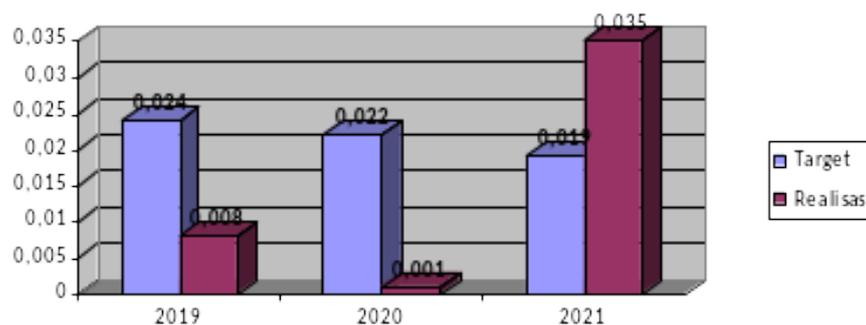
Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikator KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA, merupakan acuan bagi pemerintah pemerintah kabupaten kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Apresiasi penghargaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu : Kabupaten / Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Predikat Kabupaten Lima Puluh Kota masih sama dengan predikat tahun 2021 yaitu Madya. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 5.895.000, Sub Kegiatan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 7.460.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 5.105.000, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 6.565.000 dan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 8.035.000.

- b. Indikator Kinerja 2 : Rasio KDRT, target tahun 2021 sebesar 0,019% dan realisasi sebesar 0,035 % atau tercapai 54,29%.

Grafik 5  
Rasio KDRT Tahun 2019 sampai dengan 2021



Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan (pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 terjadi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

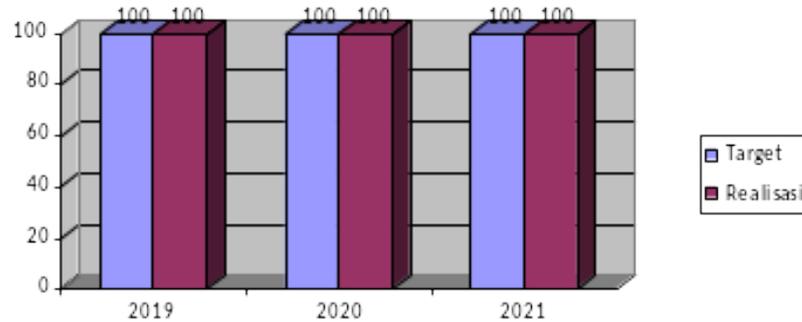
penurunan kasus KDRT yang dilaporkan. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 22.688.800, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 8.050.200, Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 117.213.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 36.361.900,-.

- c. Indikator Kinerja 3 : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu, target tahun 2021 adalah sebesar 100%, realisasi 100% atau 100%.

**Grafik 6**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan Khusus Anak, Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 18.000.000, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 31.470.000, Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 121.432.000,-

Indikator kinerja ini juga didukung oleh Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 22.688.800, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 8.050.200, Kegiatan Penyediaan Layanan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana Rp. 117.213.000, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 36.361.900,-

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya. Penghargaan KLA diberikan sebagai apresiasi kepada Kepala Daerah yang menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat di bawah ini.

Gambar III.9  
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Gambar III.10  
Penyuluhan dan dialog interaktif Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak



Gambar III.11  
Penyerahan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya kepada Kabupaten Lima Puluh Kota



**2. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

No	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisa	Target	Realis	Target	Realisasi	Target	Realisa	Target	Realisa	Ket
----	-------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------	-----

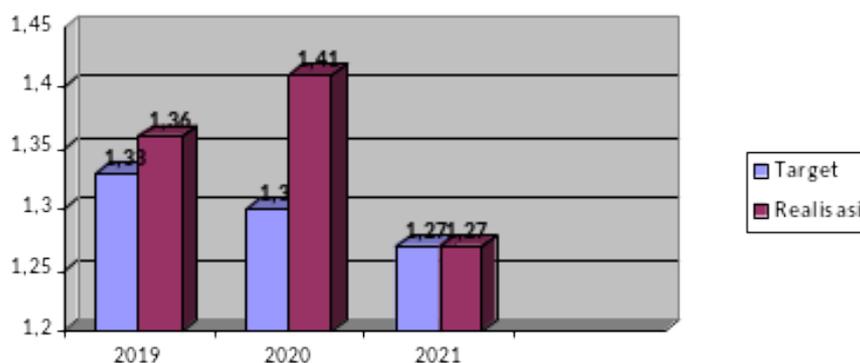
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

1	2	RPJMD	Tahun 2017	si Tahun 2017	Tahun 2018	asi Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	si Tahun 2020	Tahun 2021	si Tahun 2021
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,39	0,97	1,36	1,92	1,33	1,36	1,30	1,41	1,27	1,27
2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,53	2,52	2,49	2,45	2,45	2,45	2,41	2,48	2,37	2,48
3.	Persentase Keluarga Prasejahtera		4,13	4,03	3,9	4,5	3,7	4,4	3,5	3,8	3,3	4,71
4.	Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		41,77	24,05	41,77	39,24	50,63	36,71	63,29	34,55	29,11	29,11

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), target tahun 2021 sebesar 1,27 realisasi 1,27 atau tercapai 100%.

Grafik 7  
 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021



Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Persentase laju pertumbuhan penduduk terjadi peningkatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang

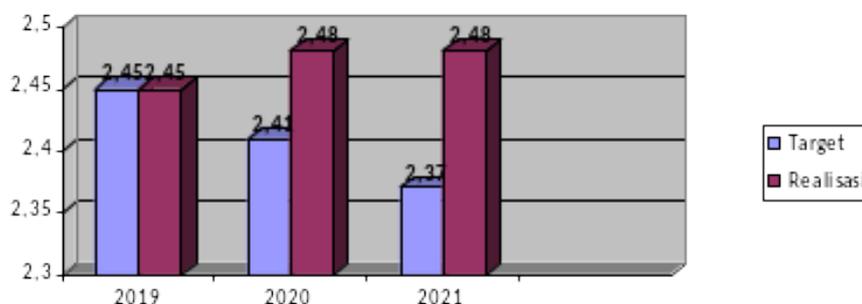
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perpindahan (migrasi). Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Penduduk Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) pagu dana sebesar Rp. 13.949.900, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal pagu dana sebesar Rp. 672.047.500, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pagu dana sebesar Rp. 2.451.786.500, Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK pagu dana Rp. 258.732.500, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pagu dana Rp. 922.669.000, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan pagu dana Rp. 101.742.000,-

- b. Indikator Kinerja 2 : Total Fertility Rate (TFR), target tahun 2021 adalah 2,37% realisasi tahun 2021 adalah 2,48% dengan capaian 95,56%.

Grafik 8  
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2019 sampai dengan  
tahun 2021

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

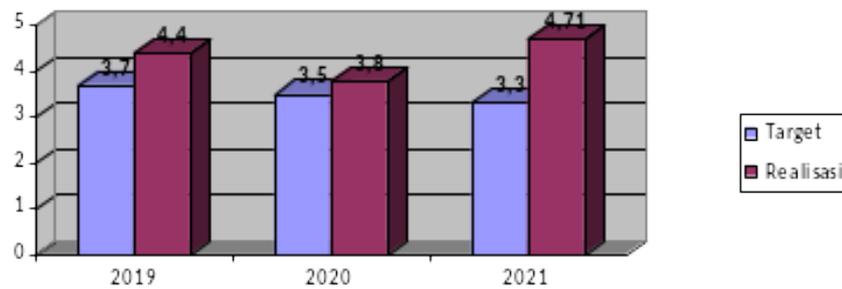


Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Fertilitas Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun). TFR berguna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program Keluarga Berencana. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan pagu dana Rp. 108.000.000, Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) pagu dana Rp. 1.103.447.200, Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK dengan pagu dana Rp. 4.035.000.

- c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Keluarga Prasejahtera target tahun 2021 adalah 3,3%, realisasi tahun 2021 adalah 4,71 % dengan capaian 70,86 %.

Grafik 9  
Persentase Keluarga Prasejahtera Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



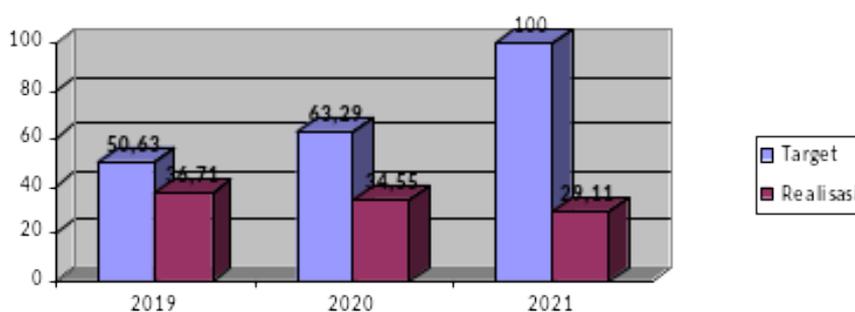
Keluarga Prasejahtera dikategorikan keluarga miskin. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan dan pengajaran agama. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase keluarga prasejahtera, hal ini disebabkan nilai pendapatan keluarga menurun antara lain disebabkan banyaknya terjadi bencana alam ataupun wabah yang melanda. Pada tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung pandemi Covid-19 telah menekan pendapatan masyarakat terutama masyarakat dengan pendapatan rendah. Dengan mengesampingkan terjadinya bencana alam dan pandemi beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah penambahan keluarga prasejahtera salah satunya dengan jalan menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Kantong – kantong keluarga prasejahtera biasanya berada pada daerah tertinggal, terpencil dan di daerah perbatasan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan pelayanan KB pada daerah-daerah tertinggal dan terpencil, membentuk dan mengaktifkan kelompok UPPKS untuk meningkatkan ekonomi keluarga, serta mengoptimalkan penyuluhan pada daerah-daerah tertinggal dan terpencil melalui pemutaran film yang memuat program keluarga berencana. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan pagu dana sebesar Rp. 108.000.000,-

Indikator Kinerja 4 : Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk target tahun 2021 adalah sebesar 100%, realisasi 29,11% atau tercapai sebesar 29,11%.

Grafik 10  
Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021



PLKB merupakan ujung tombak pengelola KB lini lapangan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB. Jumlah PLKB sampai 31 Desember 2021 sebanyak 23 orang. Idealnya penyuluh KB mempunyai wilayah kerja 1 orang per desa / nagari. Pada

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

tahun 2021 jumlah penyuluh KB ASN sebanyak 23 orang, terjadi penurunan jumlah penyuluh karena ada yang memasuki masa purna bakti sementara penambahan tenaga penyuluh ASN tahun 2021 tidak ada. Melalui lajur PPPK oleh BKKBN sebanyak 38 Penyuluh KB Non ASN Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan lulus tetapi belum mendapatkan wilayah kerja. Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan pagu dana sebesar Rp. 1.149.199.000.

Dokumentasi terkait indikator kinerja sebagaimana diatas sebagai berikut :

Gambar III.12  
Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Suliki



Gambar III.13  
Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Suliki

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



Gambar III.14  
Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Lareh Sago  
Halaban



Gambar III.15  
Penyuluhan dan dialog interaktif tentang MKJP di Radio

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**



**3. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas  
Kinerja DPPKBPPA**

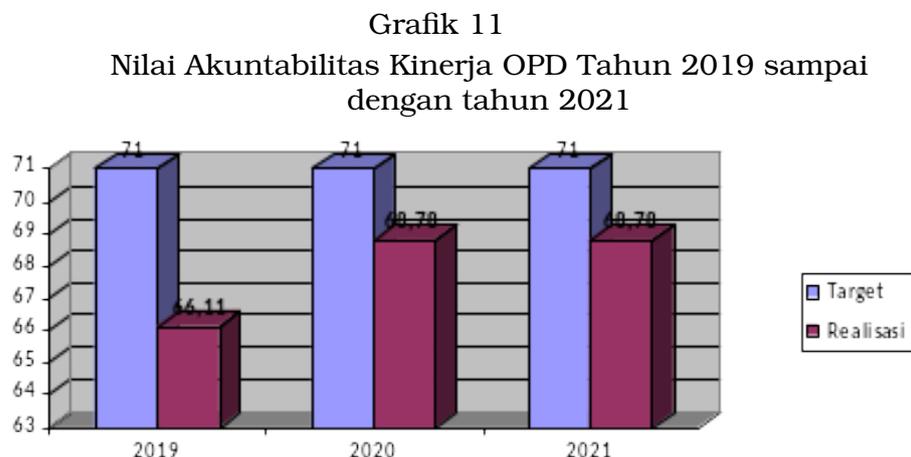
No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		0	0	71	61,50	71	66,11	71	68,78	71	68,78	

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target tahun 2021 adalah dengan nilai 71 (BB) realisasi 68,78 (B). Nilai akuntabilitas tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat dan hasilnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu dana Rp. 3.588.256.719

#### D. ANALISIS EFISIENSI

Realisasi anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.  
Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis tahun 2021

No	Program / Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	638.447.900	499.069.900	494.252.350	99,03	Efisien
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	178.755.100	184.313.900	93.897.500	50,94	Efisien
III.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	70.343.900	35.812.000	35.785.000	99,92	Efisien
IV.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	47.025.000	33.060.000	32.010.000	96,82	Efisien

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

V.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	181.094.700	170.902.000	78.663.000	46,03	Efisien
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.818.351.978	3.588.256.719	3.466.401.112	96,60	Efisien
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	19.459.900	13.949.900	13.927.400	99,84	Efisien
VIII.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.699.378.300	5.556.176.500	4.775.660.700	85,95	Efisien
IX.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	744.245.000	1.215.482.200	824.730.400	67,85	Efisien

**E. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 11.279.023.119,- (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.815.327.462,- ( Sembilan milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 86,88% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	DPA Awal	DPA Perubahan	Realisasi Perubahan	Persentase Realisasi
I.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>638.447.900</b>	<b>499.069.900</b>	<b>494.252.350</b>	<b>99,03</b>
1.1	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>60.718.600</b>	<b>48.120.900</b>	<b>46.932.900</b>	97,53

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	12.512.100	12.472.900	12.472.900	100,00
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	19.406.500	17.290.000	16.690.000	96,53
1.1.3	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	28.800.000	18.358.000	17.770.000	96,80
1.2	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>529.086.300</b>	<b>423.264.400</b>	<b>419.684.850</b>	99,15
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	529.086.300	423.264.400	419.684.850	99,15
1.3.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>48.643.000</b>	<b>27.684.600</b>	<b>27.634.600</b>	99,82
1.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.643.000	27.684.600	27.634.600	99,82
II.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>178.755.100</b>	<b>184.313.900</b>	<b>93.897.500</b>	<b>50,94</b>
2.1	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>133.010.100</b>	<b>30.739.000</b>	<b>30.564.500</b>	99,43
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.415.100	22.688.800	22.614.500	99,67
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.595.000	8.050.200	7.950.000	98,76

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

2.2	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	-	117.213.000	27.708.000	23,64
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	117.213.000	27.708.000	23,64
2.3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	45.745.000	36.361.900	35.625.000	97,97
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.745.000	36.361.900	35.625.000	97,97
III.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	70.343.900	35.812.000	35.785.000	99,92
3.1	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	70.343.900	35.812.000	35.785.000	99,92
3.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.649.900	4.995.000	4.995.000	100,00
3.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	63.694.000	30.817.000	30.790.000	99,91
IV.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	47.025.000	33.060.000	32.010.000	96,82
4.1	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	16.535.000	13.355.000	13.355.000	100,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.475.000	5.895.000	5.895.000	100,00
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.060.000	7.460.000	7.460.000	100,00
<b>4.2</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.490.000</b>	<b>19.705.000</b>	<b>18.655.000</b>	94,67
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.145.000	5.105.000	5.105.000	100,00
4.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.025.000	6.565.000	6.565.000	100,00
4.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.320.000	8.035.000	6.985.000	86,93
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.145.000	5.105.000	5.105.000	
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>181.094.700</b>	<b>170.902.000</b>	<b>78.663.000</b>	46,03
<b>5.1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.554.900</b>	<b>49.470.000</b>	<b>46.878.500</b>	94,76
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.554.900	18.000.000	17.209.500	95,61
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	31.470.000	29.669.000	94,28

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

<b>5.2</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>123.830.000</b>	<b>121.432.000</b>	<b>31.784.500</b>	26,17
5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	123.830.000	121.432.000	31.784.500	26,17
<b>5.3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.709.800</b>	-	-	
5.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.709.800	-		
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.818.351.978</b>	<b>3.588.256.719</b>	<b>3.466.401.112</b>	96,60
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.836.300</b>	<b>8.937.300</b>	<b>8.842.000</b>	98,93
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.936.600	3.076.600	3.068.000	99,72
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.061.300	1.061.300	1.031.000	97,15
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.046.300	1.046.300	1.045.000	99,88
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.046.300	1.046.300	1.017.000	97,20
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.084.500	424.500	418.000	98,47
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.661.300	2.282.300	2.263.000	99,15
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.063.203.878</b>	<b>2.993.934.269</b>	<b>2.895.166.705</b>	96,70

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.186.678	2.990.917.069	2.892.188.605	96,70
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.017.200	3.017.200	2.978.100	98,70
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	-	-	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190.459.100</b>	<b>93.132.500</b>	<b>91.704.200</b>	98,47
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.286.400	19.966.000	19.965.200	100,00
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.582.700	16.729.000	16.729.000	100,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000	2.808.000	2.340.000	83,33
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.455.000	4.262.500	4.262.500	100,00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.327.000	49.367.000	48.407.500	98,06
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.800.000</b>	-	-	
1.5.1	Pengadaan Mebel	20.000.000	-	-	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	-	-	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>347.822.700</b>	<b>318.147.650</b>	<b>297.902.823</b>	93,64
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.983.000	1.000.000	1.000.000	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.999.700	22.067.650	16.933.823	76,74
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.840.000	295.080.000	279.969.000	94,88
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>169.230.000</b>	<b>174.105.000</b>	<b>172.785.384</b>	99,24

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.670.000	160.893.000	160.250.384	99,60
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000	5.400.000	4.790.000	88,70
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.740.000	7.812.000	7.745.000	99,14
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>19.459.900</b>	<b>13.949.900</b>	<b>13.927.400</b>	99,84
<b>2.1</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>19.459.900</b>	<b>13.949.900</b>	<b>13.927.400</b>	99,84
2.1.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	19.459.900	13.949.900	13.927.400	99,84
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>5.699.378.300</b>	<b>5.556.176.500</b>	<b>4.775.660.700</b>	85,95
<b>3.1</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>3.482.136.700</b>	<b>3.382.566.500</b>	<b>2.958.343.300</b>	87,46
3.1.1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	670.137.500	672.047.500	669.159.000	99,57
3.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2.475.268.500	2.451.786.500	2.033.049.200	82,92
<b>3.3</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.181.328.100</b>	<b>1.149.199.000</b>	<b>1.103.851.500</b>	96,05
3.3.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.181.328.100	1.149.199.000	1.103.851.500	96,05

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

3.4	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.035.913.500</b>	<b>1.024.411.000</b>	<b>713.465.900</b>	69,65
3.4.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	928.669.000	922.669.000	624.175.600	67,65
3.4.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	107.244.500	101.742.000	89.290.300	87,76
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>744.245.000</b>	<b>1.215.482.200</b>	<b>824.730.400</b>	67,85
4.1	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>744.245.000</b>	<b>1.215.482.200</b>	<b>824.730.400</b>	67,85
4.1.1	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	108.575.000	108.000.000	107.119.500	99,18
4.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	628.770.000	1.103.447.200	713.575.900	64,67
4.1.3	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	6.900.000	4.035.000	4.035.000	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.397.101.778</b>	<b>11.297.023.119</b>	<b>9.815.327.462</b>	86,88

**F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI APIP TAHUN LALU**

Berdasarkan evaluasi AKIP DPPKBPPPA tahun 2020 oleh Inspektorat direkomendasikan : agar ditetapkan target keberhasilan tujuan renstra, agar Rencana Kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, agar dilakukan penyusunan mekanisme data

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

kinerja OPD, indikator kinerja individu disusun mengacu kepada IKU unit kerja, pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang yang lebih memadai, keandalan pengumpulan data kinerja dilakukan, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan / triwulanan / semesteran), pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi, IKU dimanfaatkan secara optimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan sebagai dasar reward dan punishment, IKU direview secara berkala. Laporan kinerja diupload kedalam websites, sepenuhnya menyajikan sepenuhnya informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, agar informasi kinerja dalam laporan kinerja sepenuhnya dapat diandalkan, disajikan sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja. Terhadap evaluasi inetrnak direkomendasikan : pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara optimal, dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, evaluasi program dilaksanakan secara optimal, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja, rekomendasi peningkatan kinerja, pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, menunjukkan perbaikan secara periodik, ditindaklanjuti untuk perbaikan programmelaksanakan pemantauan dimasa yang akan datang, dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. Terhadap evaluasi pencapaian sasaran kinerja oragnisasi direkomendasikan : agar target kinerja dicapai secara maksimal, mengupayakan capaian kinerja lebih baik dari capaian tahun sebelumnya dan informasi mengenai kinerja yang disajikan dapat diandalkan.

Upaya yang telah dilakukan atas rekomendasi tersebut adalah :

1. Perencanaan Kinerja :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Dinas PPKBPPPA telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan telah ditetapkan target keberhasilan tujuannya dan Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

2. Pengukuran Kinerja

Telah dilakukan penyusunan mekanisme pengumpulan data kinerja, indikator kinerja sudah mengacu kepada IKU unit kerja organisasi, pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala, dan IKU telah dimanfaatkan secara optimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta IKU telah direview secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah diupload ke dalam *website*, telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi kinerja yang disajikan akan digunakan dalam perbaikan perencanaan dan akan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta akan digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

4. Evaluasi Internal

Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan secara optimal, dan hasil evaluasi telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, evaluasi program telah dilaksanakan secara optimal dalam rangka menilai keberhasilan program dan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja, pemantauan rencana aksi akan dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan serta hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan secara periodik dilakukan secara optimal. Hasil evaluasi program akan ditindaklanjuti untuk perbaikan program di masa yang akan datang serta hasil evaluasi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Rencana Aksi akan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

Target kinerja akan dicapai secara maksimal, dan mengupayakan capaian kinerja lebih baik dari capaian tahun sebelumnya, serta akan menyajikan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan

Pada tahun 2021 dunia termasuk Indonesia mengalami pandemi Covid-19 sebagai lanjutan pandemi tahun 2020 sehingga beberapa kegiatan di tingkat nasional dan pusat tidak dilaksanakan secara tatap muka. Berikut ini disajikan beberapa prestasi yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

1. Penghargaan KLA Predikat Madya
2. Penghargaan Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia
3. Penghargaan Forum Anak Nasional
4. Penghargaan PATBM
5. Anugerah Prahita Eka Praya (APE) Kategori Pratama
6. Piagam Pelaksanaan Randa Terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat
7. Capaian KB MKJP Tingkat Kabupaten/Kota 2021
8. Juara I PLKB Non ASN tingkat provinsi Sumatera Barat
9. Juara I Pasangan Orang Tua Hebat tingkat provinsi Sumatera Barat
10. Juara II Duta Genre Terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat
11. Pembinaan Forum Genre Terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat
12. Top 10 Duta Genre Putra tingkat provinsi Sumatera Barat
13. Juara I Video Edukasi Stunting tingkat provinsi Sumatera Barat
14. Juara I Aksi Nyata Cegah Stunting tingkat provinsi Sumatera Barat

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan bentuk media pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan sarana introspeksi diri yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja bahwa 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum adalah sebesar 79,52% sehingga dapat dikategorikan tinggi.

Selama Tahun Anggaran 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 44 dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.739.149.787. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,77 %.

Untuk indikator kinerja yang belum memenuhi target pada tahun 2021, diupayakan agar tahun berikutnya dapat terpenuhi dan mengevaluasi kembali target indikator kinerja tersebut.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk pencapaian target dan sasaran Program KB, maka tetap perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum-momentum strategis antara lain : Bulan Bhakti IpeKB, Operasional Bhakti IBI, TNI Manunggal KB Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan serta momen-momen khusus lainnya.
2. Mengoptimalkan peran Kampung KB dimana Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program KKBPK (Kepedudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan
3. Peningkatan kualitas serta profesionalitas tenaga pelayanan KB dan operasional Balai Penyuluhan KB melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB
4. Peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen gugus tugas KLA untuk dapat mewujudkan Lima Puluh Kota Layak Anak
6. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kode Pos 26271  
Telp. No. (0752) 7754181 Fax. No. (0752) 7754181

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima  
Puluh Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO  
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sarilamak, Desember 2021

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes  
NIP. 19630910 199101 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan	1.1	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan ARG	100%
		1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	14,3%
		1.3	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	70%
2.	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.1	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	>900
		2.2	Rasio KDRT	0,019%
		2.3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang menamatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%
3.	Terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera	3.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,27
		3.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,37%
		3.3	Persentase keluarga prasejahtera	3,3%
		3.4	Proporsi PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100%
4.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA	4.1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	71

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 499.157.800.-	
2.	Perlindungan Perempuan	Rp. 184.313.900.-	
3.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 35.812.000.-	
4.	Pemenuhan Hak Anak	Rp. 33.060.000.-	
5.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 170.902.000.-	
6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.588.256.719.-	
7.	Pengendalian Penduduk	Rp. 13.949.900.-	

8.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	5.556.176.500,-
9.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.215.482.200,-
	<b>J U M L A H</b>	Rp.	11.297.023.119.-

Sarilamak, Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes**  
**NIP. 19630910 199101 2 001**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80%
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2.1 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	0,0036
		2.2 Rasio kekerasan terhadap anak	0,0036
3.	Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,25
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan perangkat daerah	4.1 Nilai AKIP	68
		4.2 Nilai IPB	16
		4.3 Nilai IKM	85

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes**  
 NIP. 19630910 199101 2 001



Piagam Penghargaan kepada Dinas PPKBPPPA atas partisipasi dalam penanggulangan pekerja anak di Indonesia



Piagam Penghargaan kepada Nagari Ampalu atas partisipasinya dalam penanggulangan pekerja anak di Indonesia



Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2021



Piagam Penghargaan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kabupaten Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama